

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN (FKP) 2024

“Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia: Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah”

Rabu, 26 Juni 2024

Forum Kajian Pembangunan

FKP adalah forum tempat para peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, komunitas internasional, dan pembuat kebijakan bertemu dan mendiskusikan hasil studi tentang isu-isu kebijakan pembangunan terkini di Indonesia. FKP diselenggarakan oleh konsorsium berbagai organisasi yang bekerja sama dengan Indonesia Project dari Australian National University (ANU). Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium FKP secara bergiliran menjadi tuan rumah untuk mengadakan seri seminar FKP. Pada Juni 2024 ini, SMERU kembali menjadi tuan rumah untuk dua seri seminar FKP dengan dua topik: (1) mendorong pengurangan ketimpangan di kawasan konservasi perairan, dan (2) meningkatkan peran pemerintah daerah dalam transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.

Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Pemerintah berupaya memperkuat komitmen adaptasi perubahan iklim berdasarkan pelaksanaan Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Melalui dokumen Enhanced NDC, Pemerintah Indonesia menyampaikan peningkatan target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni dari target awal 29% menjadi 31,89% (dengan kemampuan sendiri), dan dari 41% menjadi 43,20% (dengan dukungan internasional). Secara bertahap, target penurunan emisi oleh Indonesia akan sejalan dengan visi jangka panjang menuju Net Zero Emission 2050.

Transisi energi menjadi salah satu kunci utama dalam upaya untuk mencapai target tersebut. Pemerintah daerah akan turut berperan penting, khususnya setelah disahkannya Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan, yang mengatur kewenangan pengelolaan dan pelaksanaan subbidang energi baru dan terbarukan (EBT) daerah sebagai urusan tambahan provinsi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam agenda transisi energi, dan kemampuan mereka dalam mengisi peran tersebut menjadi kunci untuk transisi energi yang berkeadilan.

Pada 2023, SMERU melakukan studi yang bertujuan untuk menyusun strategi dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan transisi energi berkeadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, The SMERU Research Institute (SMERU) berusaha menyajikan sebuah wadah untuk berdiskusi tentang **“Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia: Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah”** melalui seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP). Tema tersebut akan dibahas melalui tiga sub-topik, yaitu (i) tata kelola transisi energi berkeadilan, (ii) upaya peningkatan peran pemerintah daerah dalam transisi energi, dan (iii) peran pemerintah daerah dan aktor nonpemerintah di daerah dalam melaksanakan transisi energi berkeadilan

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman mengenai strategi tata kelola transisi energi berkeadilan
2. Menyoroti upaya peningkatan peran pemerintah daerah dalam transisi energi
3. Menyoroti peran pemerintah daerah dan aktor nonpemerintah dalam transisi energi berkeadilan

Peserta

Kegiatan seminar ini akan mengundang sekitar 150 peserta yang berhubungan dengan isu transisi energi, seperti perwakilan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri), pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, organisasi nonpemerintah (ornop), pemerhati lingkungan, dan sektor swasta

Waktu dan Tempat

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Waktu : 09.00–11.45 WIB

Tempat : Zoom (registrasi: <https://smeru.or.id/registrasifkp2024seri2>) dan *live stream* via YouTube (<https://www.youtube.com/@SMERUInstitute>)

Acara ini dilengkapi dengan juru bahasa isyarat dan terdapat sertifikat elektronik bagi peserta.

Agenda

Acara akan dilaksanakan dalam bentuk seminar yang dipandu oleh moderator. Narasumber akan memaparkan topik bahasan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab. Para peserta dipersilakan untuk menyampaikan pendapat dan berbagi pengalaman secara langsung, baik melalui kolom tanya-jawab maupun secara lisan.

Waktu	Kegiatan
09.00–09.10	Widjajanti Isdijoso (Direktur, SMERU) membuka acara, menyambut pembicara, dan peserta. (10')
09.10–09.25	Pengantar sesi presentasi oleh Tiza Mafira (Direktur, Climate Policy Initiative) selaku moderator (*) (15')
09.25–10.25	Sesi Presentasi (60') <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A (Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional) (*) "Tata Kelola Energi untuk Mencapai Transisi Energi Berkeadilan" 2. Ir. Edison Siagian, ME (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I) (*) "Upaya Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi" 3. Hening Wikan (Peneliti, SMERU) "Peran Pemerintah Daerah dan Aktor Nonpemerintah di Daerah dalam Transisi Energi Berkeadilan"
10.25–11.25	Diskusi dan Tanya-Jawab (60') Sesi diskusi dan tanya-jawab akan dibagi menjadi beberapa termin.
11.25–11.35	Tiza Mafira (Direktur, Climate Policy Initiative) merangkum hasil diskusi (10')
11.35–11.45	Widjajanti Isdijoso (Direktur, SMERU) menutup acara (10')

(*) masih dalam konfirmasi

Poin Pembahasan

Topik	Poin Pembahasan	Pemateri
Tata Kelola Energi untuk Mencapai Transisi Energi Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar tentang Transisi Energi Berkeadilan <ul style="list-style-type: none"> ○ Definisi dan prinsip-prinsip dasar transisi energi berkeadilan. ○ Alasan pentingnya transisi energi berkeadilan di Indonesia. • Kebijakan dan Regulasi Energi <ul style="list-style-type: none"> ○ Gambaran umum kebijakan nasional terkait energi. ○ Regulasi yang mendukung transisi energi berkeadilan. • Strategi Nasional untuk Transisi Energi Berkeadilan <ul style="list-style-type: none"> ○ Rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang. • Tantangan Tata Kelola Energi di Tingkat Nasional 	Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A (Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional) (*)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tantangan dalam implementasi kebijakan energi. ○ Hambatan birokrasi dan koordinasi antar instansi pemerintah pusat. 	
Upaya Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> ○ Pentingnya peran pemerintah daerah dalam transisi energi. ○ Tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah terkait energi. • Regulasi Energi di Daerah <ul style="list-style-type: none"> ○ Regulasi yang mendukung peran pemerintah daerah dalam energi. • Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah <ul style="list-style-type: none"> ○ Peran pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah. ○ Mekanisme koordinasi dan sinergi antar tingkat pemerintahan. • Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> ○ Kebutuhan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia di daerah. ○ Program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah. 	Ir. Edison Siagian, ME (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I) (*)
Peran Pemerintah Daerah dan Aktor Nonpemerintah di Daerah dalam Transisi Energi Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi Multisektoral <ul style="list-style-type: none"> ○ Siapa saja aktor pemerintah daerah yang terlibat dalam transisi energi ○ Siapa saja aktor nonpemerintah yang terlibat dalam transisi energi. ○ Peran dan kontribusi mereka dalam transisi energi. • Inisiatif dan Program Daerah dalam Transisi Energi <ul style="list-style-type: none"> ○ Contoh inisiatif dan program yang dilakukan di daerah terkait transisi energi • Tantangan dan Masalah dalam Implementasi di Daerah <ul style="list-style-type: none"> ○ Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam transisi energi ○ Masukan dari daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut 	Hening Wikan (Peneliti, SMERU)

Narahubung

Ratri Indah Septiana (0816-136-1514/rseptiana@smeru.or.id) dan Yudi Suwarna (0819-0558-1020/ysuwarna@smeru.or.id).